

Judul : Perubahan sertifikasi produk: LSPro swasta mulai rumahkan karyawan
Tanggal : Rabu, 08 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perubahan Sertifikasi Produk

LSPro Swasta Mulai Rumahkan Karyawan

ASOSIASI Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI) mengungkapkan keprihatinan atas kondisi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) swasta yang terdampak perubahan kebijakan terkait penunjukan lembaga sertifikasi. Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty akan meminta penjelasan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait masalah tersebut.

Dalam keterangan ALSI, sejak awal 2025 setidaknya telah terbit 21 surat Keputusan Menteri yang menunjuk Balai Besar Standardisasi milik Kemenperin sebagai pihak utama untuk mensertifikasi sejumlah produk impor tertentu. Sementara peran LSPro swasta lebih banyak terbatas pada sertifikasi produk dalam negeri yang volumenya relatif kecil.

Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah permintaan layanan LSPro swasta. Banyak LSPro swasta yang harus melakukan efisiensi kegiatan operasional mereka, termasuk

merumahkan karyawan. Padahal, peran mereka mendukung penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) cukup krusial.

Menanggapi hal tersebut, Evita menegaskan, jika kebijakan itu benar-benar berdampak pada penurunan permintaan layanan LSPro swasta, maka harus mendapat perhatian. "Apalagi jika efeknya sampai menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan, maka kebijakan itu perlu dievaluasi," ujarnya kepada *Rakyat Merdeka*, Selasa (7/10/2025).

Anggota Fraksi PDIP itu menjelaskan, sertifikasi produk merupakan elemen penting dalam sistem jaminan mutu nasional. Karena itu, dia meyakini kebijakan baru yang diterapkan Kemenperin dimaksudkan untuk memperkuat sistem tersebut tanpa menutup peran LSPro swasta.

"Karena selama ini LSPro swasta justru banyak membantu pengembangan UKM dan industri menengah," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya akan me-



Evita Nursanty

mintakan Kemenperin bersama Badan Standardisasi Nasional segera duduk bersama dengan ALSI dan seluruh LSPro terdampak untuk mencari solusi kolaboratif. Antara lain melalui penataan regulasi, pembinaan kompetensi, serta mekanisme transisi yang tidak merugikan tenaga kerja.

"Tentunya Komisi VII akan mengawal agar kebijakan standarisasi dan sertifikasi tidak menimbulkan distorsi pasar, tetapi justru memperkuat sistem mutu nasional dan daya saing industri dalam negeri," katanya.

Lebih lanjut, kata dia, masalah utama yang dihadapi industri dalam negeri saat ini adalah derasnya arus masuk produk impor. Situasi tersebut membuat posisi dan daya saing produk industri lokal semakin menurun, sehingga sulit berkembang.

"Saya rasa langkah yang diambil Kemenperin melalui kebijakan baru yang berkaitan dengan LSPro ini memang bertujuan untuk membatasi membanjirnya produk impor," katanya.

Sebelumnya Ketua Umum ALSI Nyoman Susila mengungkapkan, dalam delapan bulan terakhir, banyak anggota ALSI menghadapi tekanan berat akibat perubahan kebijakan. Saat ini terdapat puluhan LSPro swasta yang tergabung dalam ALSI, seluruh-

nya telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan memiliki kompetensi sesuai lingkup produk SNI wajib.

Sebagian besar LSPro tersebut bahkan telah menanamkan investasi besar, mencapai Rp 25-50 miliar per lingkup produk, untuk membangun laboratorium uji mandiri. Kata dia, LSPro swasta berperan penting bukan hanya dalam membantu industri, tapi juga mendukung Pemerintah memastikan produk yang beredar di pasar memenuhi standar mutu dan keselamatan.

"Kami khawatir, jika kondisi ini terus berlanjut, banyak LSPro swasta yang tidak akan mampu bertahan," ujar Nyoman.

Untuk mencari solusi, ALSI membentuk tim kajian, melakukan serangkaian pertemuan, baik internal maupun dengan pemangku kepentingan, termasuk berdialog dengan Komisi VII DPR. ALSI menilai, pengaturan baru ini berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan, menghambat iklim persaingan usaha yang sehat. ■ PYB